



MODEL PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA (TJSLBU) DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI PROVINSI RIAU

19 - 20 Agustus 2025

Rachmiwati Yusuf, Parlin H. Sinaga, Nurhayati,
Fadhlan Zuhdi, Sri Milawati Asshagab, Khoiru Rizqy
Rambe, Indra Agus Lukman, Helmi Chazali Lubis,
Rindukasih Bangun

 www.brin.go.id

 08127571370



Pendahuluan



Sangat penting untuk memahami betapa krusialnya pembangunan di Provinsi Riau guna menjadi salah satu pondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan



Pendanaan untuk pembangunan memiliki peran yang sangat penting untuk dapat memajukan Provinsi Riau baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan



Penting bagi Pemerintah Provinsi Riau dan stakeholder untuk bekerja sama dalam mengalokasikan dan mengelola dana pembangunan dengan baik dan efisien



Kepastian tersedianya dana untuk pembangunan di Provinsi Riau bagi Masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan



Pendahuluan



Pendanaan pembangunan oleh pemerintah daerah masih sering bertumpu pada anggaran yg bersumber dari pajak dan retribusi, shg ketersediaannya sangat terbatas.



Pemerintah berupaya mengoptimalkan peran serta dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun pelaksanaan TJSLBU oleh badan usaha belum terkoordinir dgn baik.



Perlu adanya mekanisme yg sinergi dan terorganisasi antara pemerintah daerah dan badan usaha , shg dana TJSLBU dapat disesuaikan dgn kebutuhan pembangunan daerah



Diharapkan peran badan usaha dalam Pembangunan daerah dapat semakin besar & terlihat manfaatnya bagi masyarakat, shg mendorong peningkatan nilai badan usaha itu sendiri

Permasalahan



Lemahnya transparansi



Akuntabilitas



Efektifitas pelaksanaan



Tujuan Riset

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana TJSLBU di Provinsi Riau, yang dapat membawa dampak positif pada pembangunan berkelanjutan



Mengidentifikasi dan mengevaluasi stakeholder yang relevan dalam pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha



Mengevaluasi persepsi stakeholders terhadap pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha



Membangun model pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Provinsi Riau





Rangkuman Metode



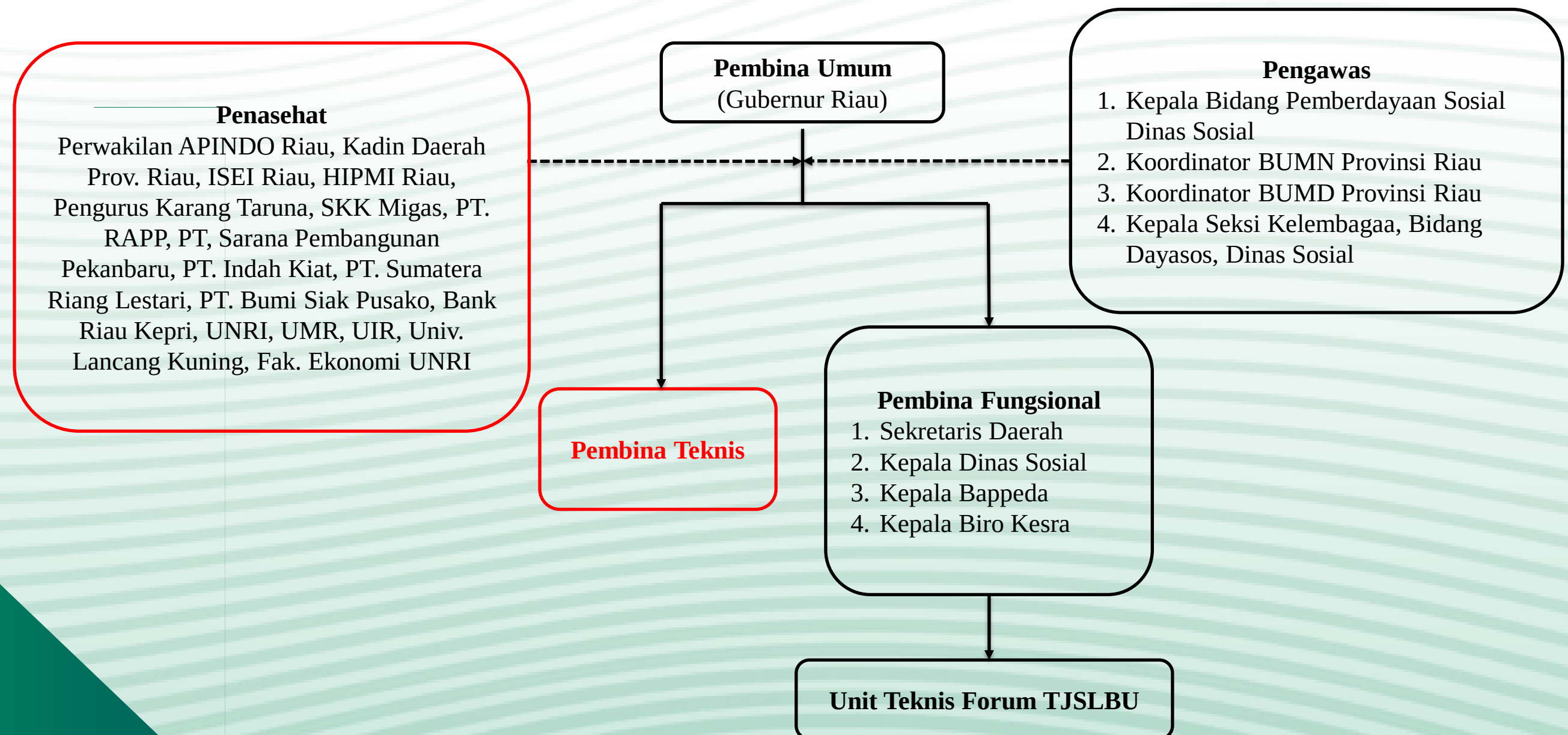
Tujuan	Teknik/ Metode Analisis	Data/ Sumber Data	Jenis Data
Mengidentifikasi dan mengevaluasi <i>stakeholder</i> yang relevan dalam pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha	<i>Stakeholder Analysis</i>	Wawancara Mendalam dan Observasi Pasrtisipatif	Primer
Mengevaluasi persepsi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha	<i>Importance Performance Analysis (IPA)</i>	Kuesioner yang disebar kepada <i>stakeholders</i> (pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, lembaga swadaya, media dan masyarakat)	Primer

No	Narasumber	Bidang	Lokasi
1	Pemerintah Daerah		
	Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Pemerintah	Kampar
	Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan	Pemerintah	Pelalawan
	Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten Siak	Pemerintah	Siak
	Bappeda dan Dinas Sosial Kota Dumai	Pemerintah	Dumai
	Bappeda dan Dinas Sosial Provinsi Riau	Pemerintah	Pekanbaru
2	Perusahaan / Badan Usaha		
	PT. Arara Abadi	Pengolahan Kertas	Siak
	PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III	Perkebunan Kelapa Sawit	Pekanbaru
	PT. Riau Andalan Pulp & Paper (April)	Pengolahan Kertas	Pelalawan
	PT. Pertamina Hulu Energi	Minyak dan Gas	Dumai
3	Masyarakat		
	Masyarakat	Keseluruhan	Semua Lokasi
4	Media		
	PT. Riau Multimedia Corporindo	Media Cetak dan Online	Pekanbaru
5	Akademisi		
	Universitas Islam Riau	Perguruan Tinggi	Pekanbaru



Struktur Organisasi Forum TJSILBU Riau

Forum TJSILBU Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional Forum TJSILBU dengan Nomor: 03.10/SK/FCSRI-TJSILBU/XII/2022 tentang Pengesahan Kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Riau Masa Bakti 2022-2027.





Tantangan Pelaksanaan TJSLBU di Riau



Perusahaan

Perusahaan mengakui masih menghadapi resistensi dari masyarakat jika kegiatan yang dicanangkan perusahaan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat



Pemerintah

Pemerintah daerah masih minim melakukan pengawasan kegiatan TJSLBU. Kegiatan TJSLBU tidak disinkronkan dengan program pemerintah daerah dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLBU belum berjalan



Masyarakat

Pola pikir masyarakat yang menganggap kegiatan TJSLBU oleh perusahaan sebagai sebatas bantuan, bukan untuk kegiatan produktif berkelanjutan



Forum TJSLBU

Keberadaan forum TJSLBU di Provinsi Riau juga belum memberikan kontribusi banyak dalam mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU di Provinsi Riau sesuai amanat Permensos No. 9 Tahun 2020

Perhitungan Analisis Instrumen IPA



Indikator	Kinerja	Harapan	Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	Keterangan
Bukti Fisik / Tangible	3.207	4.112	78.004	Baik
Kehandalan / Reliability	3.270	4.001	81.723	Baik
Daya Tanggap / Responsive	2.957	4.078	72.511	Baik
Jaminan / Assurance	3.119	4.076	76.529	Baik
Empati / Emphaty	2.990	4.099	72.942	Baik
Total	3.109	4.073	76.321	Baik



Strategi Penerapan



1

Penguatan Regulasi Daerah

Menyusun peraturan daerah atau petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan TJSLBU agar lebih terarah dan terukur sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

2

Pembentukan Forum Koordinasi

Membangun wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk merencanakan dan memantau program TJSL secara partisipatif.

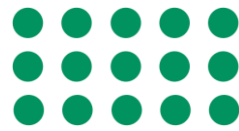
3

Pemetaan Kebutuhan dan Potensi Daerah

Melakukan identifikasi prioritas pembangunan serta potensi kontribusi badan usaha untuk memastikan kesesuaian program TJSL dengan kebutuhan lokal.



Strategi Penerapan



4

Integrasi kedalam Dokumen Perencanaan Daerah

Mengintegrasikan program TJSL ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau rencana kerja pemerintah daerah.

5

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Mewajibkan pelaporan terbuka atas dana TJSL yang dikelola perusahaan dan evaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

6

Pemanfaatan Platform Digital

Mengembangkan sistem informasi daring yang mendokumentasikan seluruh kegiatan TJSL secara real-time untuk monitoring, evaluasi, dan pelibatan publik.



Strategi Penerapan



7

Pendampingan dan Penguatan Kapasitas

Memberikan pelatihan kepada perusahaan dan pemerintah daerah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan TJSI yang berbasis pembangunan berkelanjutan..



Rekomendasi Kebijakan



Pemerintah Daerah

- Menyusun peraturan daerah yang mengatur mekanisme pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TJSLBU secara terstandar.
- Memasukkan program TJSLBU ke dalam RPJMD dan RKPD agar mendukung prioritas pembangunan daerah



Badan Usaha

- Merancang program TJSL berdasarkan pemetaan kebutuhan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
- Menyediakan laporan terbuka berkala terkait anggaran, pelaksanaan, dan dampak program TJSL.



Masyarakat Sipil

- Terlibat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) dan pemantauan pelaksanaan TJSLBU.
- Membentuk forum warga untuk menyalurkan aspirasi dan mengevaluasi dampak program TJSL..



Lembaga Akademik

- Menyediakan kajian ilmiah mengenai efektivitas, dampak, dan tantangan implementasi TJSLBU
- Menjadi mitra dalam penyusunan program dan evaluasi berbasis indicator pembangunan berkelanjutan.



Terimakasih Atas Perhatiannya

APAKAH ADA PERTANYAAN?

 www.brin.go.id

 108127571370

 Cibinong, Jawa Barat

 rach029@brin.go.id



DOKUMENTASI



D
O
K
U
M
E
N
T
A
S
I

